

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN
PENGGUGAT KARENA WANPRESTASI DALAM
KONTRAK KERJA

(Studi Kasus Putusan No.563/Pdt.G/2013/PN.Mdn)

OLEH:

DEVI SELVIYANA

NPM: 12 840 0143

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana proses pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan, dan Faktor-faktor apa saja gugatan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard*) Dalam Putusan Perkara No. 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Medan, dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja gugatan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard*) Dalam Putusan Perkara No. 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) terhadap perkara perlawanan eksepsi di Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan melalui jalur perkara yang dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan di persidangan yang meliputi jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan, meskipun pada prinsipnya gugatan yang tidak diterima bukan merupakan penolakan terhadap pokok perkara. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima adalah kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya juga bagian dari kelalaian oleh pihak pengadilan dalam menerapkan amanah Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pencari keadilan untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna. Pada Putusan No. 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn Bahwa dalam KUHPerdara sebagai sandaran pokok dalam menjalin hubungan hukum (perjanjian), maka yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal mana sesuai dengan asas yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yaitu “persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan penggugat sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga tidak terdapat adanya manfaat atau kerugian penggugat atas pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, cukup menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Sehingga gugatan di tolak oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di persidangan seharusnya menjamin penegakan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian, harus betul-betul memahami isi dari perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama, harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, dan tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak yang membuat perjanjian

Kata Kunci: Wanprestasi, Penolakan Gugatan, Pengadilan Negeri

ABSTRACT
REVIEW JURIDICAL RECEIPT CAN NOT BECAUSE THE PLAINTIFF
CLAIMS IN TORT
EMPLOYMENT CONTRACT
(Case Study Decision 563 / Pdt.G/2013/PN.Mdn)

BY:
DEVI SELVIYANA
NPM : 12 840 0143
FIELD CIVIL LAW

Problems in the thesis is how the process of filing a lawsuit in the District Court of Medan, and any factors lawsuit unacceptable (ont Niet ver van kelijk klaard) In Case Decision No. 563 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn. The purpose of this study was to determine the process of filing a lawsuit in the District Court of Medan, and to determine any factors lawsuit unacceptable (ont Niet ver van kelijk klaard) In Case Decision No. 563 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn. Implementation of the imposition of a decision by the ruling of the lawsuit can not be accepted (Niet Ont van kelijk ver klaard) on case resistance exceptions in the Medan District Court conducted through the case starting from the filing of the lawsuit, the examination at the trial which includes responsibility-answer, evidence and conclusions to the imposition verdict , although in principle the lawsuit is not acceptable is not a rejection of the principal case. Decisions by amar lawsuit unacceptable is the fault of the plaintiff in formulating his complaint was also part of a default by the courts in implementing the mandate of Article 119 HIR / 143 Rbg that gave the chairman of the district court to give advice and assistance to those seeking justice in order to prevent their lawsuit is not perfect. In Decision No. 563 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn Whereas in the Civil Code as a principal in a relationship backrest law (treaty), then valid as a plaintiff or defendant in a case arising from the agreement, is limited to self-direct the parties involved in the agreement the. Which case in accordance with the principle explicitly mentioned in Article 1340 of the Civil Code that "consent is only binding or valid between the parties who made it. That in the absence of the claimant's involvement as a party in such agreements, so there is no benefit or harm the plaintiff on the implementation of these agreements, please indicate the absence of a legal relationship between the plaintiff and the defendant. So the lawsuit was rejected by the Parties to the Medan District Court. The panel of judges who examined a case in court should ensure the enforcement of the principle of judicial quick, simple and inexpensive. We recommend that the parties in the agreement, must truly understand the content of the covenant they made and agreed upon, should really find out what the rights and obligations of the respective parties, and to avoid misunderstandings between the parties make an agreement

Keywords: Default, Denial lawsuit, the district court